

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat (4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Jusmaliani dkk, 2008: vii).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paroan* atau *fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh) (Harun, 2000:169).

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya (Harun, 2000:170).

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Dalangan justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi *wanprestasi* (ingkar janji) dari pihak pemilik tanah.

Masyarakat Desa Dalangan kecamatan Tulung kabupaten Klaten sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Dalangan, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Namun ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut (*paroan*) atau dikenal dengan *Muzara'ah* dalam istilah *fiqih muamalah*.

Dari permasalahan di atas, dapat digarisbawahi bahwa akad bagi hasil tanaman (*muzara'ah*) antara pemilik tanah dan petani buruh sehingga terjadi *wanprestasi*. Apakah akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Dalangan sudah sesuai dengan syari'at atau belum. Hal ini karena pengertian akad *muzara'ah* menurut ulama Syafi'iyah tidak sah kecuali apabila *al-muzara'ah* mengikuti pada akad *al-musaqoh* (kerja sama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama) sehingga akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *musaqoh*. Hal ini tidak jauh dengan pendapat ulama Malikiyah mendefinisikan akad sebagai bentuk perserikatan dalam pertanian. Sedangkan menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

Imam asy-Syafi'i mendefinisikan *mukhabarah* dengan: pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah. Dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

Menurut Amir *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang lain, agar ditanami, dengan perjanjian membagi hasil tanaman itu untuk keduanya, menurut perjanjian yang telah ditentukan (Amir, 1986: 200).

Bagaimanapun juga permasalahan akad *muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap yang terjadi di Desa Dalangan menarik untuk diteliti. Oleh sebab peneliti tertarik untuk meneliti persoalan akad *muzara'ah* tersebut dengan menulis skripsi berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad**

Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten).

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Tinjauan

Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 1061).

2. Hukum Islam

Hukum Islam berarti peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, atau undang-undang, peraturan, dsb, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 360).

3. Akad

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi dalam (Abdul Ghafur Anshori, 2010:22) Kata akad atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sementara itu (Ahmad Azar Basyir, 2000: 65) memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kaful* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat

hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan akad dalam skripsi ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

4. *Muzara'ah*

Secara etimologi *al-muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqih terdapat beberapa definisi. Ulama Malikiyah mendefinisikan *al-muzara'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Habbalah *al-muzar'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seseorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua (Harun, ttp: 275).

Adapun yang dimaksud *al-muzara'ah* dalam skripsi ini adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

5. Desa Dalangan

Desa Dalangan adalah salah satu desa dengan luas 190,3715 Ha yang berada di Kecamatan Tulung kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Dalam skripsi ini petani Desa Dalangan adalah menjadi objek penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *muzara'ah* di Desa Dalangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *muzara'ah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek *muzara'ah* yang ada di Desa Dalangan, Kecamatan tulung, Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad *muzara'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan *muzara'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* dan pengetahuan tentang ilmu hukum Islam.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat yang bagi para petani di Desa Dalangan pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

1. Musyarofah (2008) dengan judul skripsi *Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabaupaten Karanganyar)*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: dasar hukum bagi hasil yaitu hadist dari Ibnu Umar. Dalam *muzaro'ah* juga ada rukun, syarat-syarat dan pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Kelurahan Kragan memiliki luas wilayah 319.951.5 Ha, arealnya merupakan dataran rendah yang terwujud dalam sebagian hamparan pertanian yang kebanyakan ditanami padi. Meskipun sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, bukan berarti hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencaharian penduduk desa Kragan dalam memenuhi kebutuhan hidup

mereka di bidang ekonomi, mereka juga menjadi guru, wiraswasta, pertukangan atau lainnya.

Dalam praktek pelaksanaan muzaro'ah, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Dan dalam perjanjian juga tidak ditentukan berapa tahun penggarapan sawah, tetapi tergantung pada kesanggupan pengelola atau penggarap. Meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang dalam pengolahan tanah sawah. Dimana antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan sehingga tanpa disadari hal ini menjadikan suatu hubungan ukhuwah yang didasari oleh rasa saling tolong menolong antar sesama di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga atau yang lainnya.

Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem paroan sawah (muzaro'ah) tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.

2. Masfuk Zuhdi (1997) menulis sebuah buku dengan judul *akad bagi hasil tananam (musaqoh).*” Dalam buku ini disimpulkan bahwa musaqoh merupakan kerjasama antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama atau paroan. Pemilik pohon dan pemelihara mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Mendapat jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan akad

musaqoh, baik secara terpisah atau secara bersamaan (*muzara'ah*) karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak.

3. Abu Bakar Jabir El Jazairi (1991) menulis sebuah buku dengan judul "*Mudhorobah (kerjasama bagi hasil)*". Dalam buku itu disimpulkan bahwa *mudhorobah* ini ialah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan syarat yang disepakati. Sedangkan kerugian yang terjadi hanya tanggungan pihak yang mempunyai modal, yang mengusahakannya cukuplah hanya rugi dalam usahanya saja, dia tidak dibebani kerugian lainnya. Berdasarkan *ijma* (kesepakatan) para sahabat dan para imam memperbolehkan kerjasama bagi hasil (*mudhorobah*) ini.
4. Eko setyono (UMS, 2011) dalam penelitian skripsinya yang berjudul *analisis factor yang mempengaruhi pemberian dana PUAP terhadap petani di kabupaten boyolali*. Yang menyimpulkan tingkatan penghasilan petani, luas tanah serta personal kelompok sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian dana PUAP, tetapi yang paling menentukan sebenarnya dalam memutuskan pemberian dana PUAP adalah luas tanah sangat berpengaruh besar.
5. Siti Romdiah (2002) dalam penelitiannya dengan judul *Analisis kesesuaian potensi, produksi dan produktifitas pertanian padi sawah di Kabupaten Klaten tahun 2000*, dengan tujuan mengetahui distribusi potensi, produksi dan produktifitas pertanian padi sawah dan tingkat kesesuaiannya pada tingkat kecamatan di Kabupaten Klaten, mengetahui besarnya pengaruh ketiga faktor potensi pertanian tersebut terhadap

produktifitas pertanian padi sawah secara individu dan bersama-sama, mengetahui faktor potensi pertanian yang paling berpengaruh terhadap produktifitas padi sawah di Kabupaten Klaten.

Dari kelima penelitian diatas, masing-masing belum ada yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil *muzara'ah*. Maka peneliti akan melakukan penelitian di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten.

G. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Madrals, 2006: 24).

Adapun uraian mengenai metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan metode analisis data yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah petani (pemilik tanah dan petani penggarap) di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang melakukan akad (perjanjian) *muzara'ah*. Karena di Desa tersebut banyak ditemukan permasalahan-permasalahan terkait *muzara'ah*, khususnya akad *muzara'ah*, sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Quisioner

Quisioner dilakukan kepada penggarap tanah dan pemilik tanah garap di Desa Dalangan, Responden untuk petani penggarap sebanyak 8 responden dan responden untuk pemilik tanah garap sebanyak 8 responden, Dengan memperhatikan pemahaman responden dalam ilmu pengetahuanya tentang *muzara'ah*/perjanjian akad bagi hasil pertanian sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam penyusunan dan menganalisis terhadap kasus yang ada.

a. Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan atau kesatuan-kesatuan atau individu-individu yang karakteristiknya diduga

(Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1996: 111). Dalam penelitian ini adalah Petani Desa Dalangan, Kabupaten Klaten.

b. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sample* yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria tertentu yang berhubungan dengan permasalahan tentang tinjauan hukum islam terhadap akad *muzara'ah* studi kasus di Desa Dalangan. Subjek dalam penelitian ini adalah petani pengarap dan pemilik tanah di Desa Dalangan yang sedikit banyak mengetahui atau mengerti tentang permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku, kitab-kitab, literatur, atau dokumentasi yang erat hubungannya dengan akad *muzara'ah* yang diteliti dan sumber lainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

2) Pengamatan (Observasi)

Adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan (Winarno dan Surahman, 1987: 162).

4. Metode pengumpulan data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari kuesioner dan penelitian. Dokumentasi akhirnya diperlukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Teknis analisa data yang penulis gunakan adalah kualitatif, analisa kualitatif adalah uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis, yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh (Sukanto, 1983: 3).

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual (Soemantri, 2000: 48).

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan umum tentang akad bagi hasil yang berisi tentang pengertian akad bagi hasil *muzara'ah*, dasar hukum akad bagi hasil *muzara'ah*, rukun *muzara'ah*, syarat-syarat *muzara'ah*, akibat akad *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*, hikmah *muzara'ah*.

BAB III Akad bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten berisi gambaran umum lokasi penelitian, Pembahasan Praktek *muzara'ah* di Desa Dalangan meliputi dari segi akad *muzara'ah*, objek *muzara'ah*, sistem bagi hasilnya.

BAB IV Merupakan analisis akad bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten yang berisi akad *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten, kesesuaian akad *muzara'ah* di Desa Dalangan dengan akad *muzara'ah* menurut hukum Islam.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka.